BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1983, Direktorat Jendral Pajak secara berkelanjutan melakukan reformasi pajak dengan tujuan utama dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka memenuhi target penerimaan pajak. Namun di sisi lain, wajib pajak umumnya memandang bahwa kewajiban membayar pajak merupakan beban karena, pajak merupakan sebuah pertukaran sumber daya dari sektor bisnis menuju sektor publik/pemerintah yang akan berdampak berkurangnya daya beli/belanja, untuk itu wajib pajak berupaya untuk mengurangi beban pajak dengan melakukan manajemen pajak atau mengarahkan segala proses bisnis atau keputusan bisnis yang menguntungkan secara pajak (*tax favored*). Pada perusahaan publik, pemegang saham selalu menghendaki agar manajer mengambil keputusan bisnis yang sejalan dengan kepentingan pemegang saham, demikian pula untuk keputusan manajer terkait pajak, pemegang saham menghendaki keputusan tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan setelah pajak.

Penelitian yang ada mengenai strategi bisnis umumnya mengenai bagaimana kesesuaian strategi tersebut dengan berbagai faktor kontekstualnya seperti lingkungan, sistem akuntansi manajemen, dan dihubungkan dengan kinerja, tidak memperhatikan konsekuensi pajak atas strategi bisnis yang diterapkan. Beberapa penelitian terdahulu banyak yang

telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu yang berasal dari karakteristik perusahaan (Gupta dan Newberry, 1997; Rego, 2003; Phillips, 2003; Dyreng *et al.*, 2008; Armstrong *et al.*, 2012; dll), dan dari karakteristik eksekutif secara individu (Dyreng *et al.*, 2010). Sepanjang sepengetahuan peneliti, hanya ada satu penelitian yang mengkaitkan strategi bisnis perusahaan dengan penghindaran pajak (untuk konteks pajak di Amerika), yaitu penelitian Higgins, *et al.* (2011; 2012). Sedangkan di Indonesia belum ada penelitian mengenai pengaruh strategi bisnis perusahaan terhadap tingkat tax avoidance.

Dalam konteks perpajakan di Indonesia ini berbeda dengan di Amerika. Di Indonesia, hanya terdapat dua upaya yang dapat ditempuh wajib pajak untuk mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar, yaitu secara legal (melalui perencanaan pajak efektif, sering disebut sebagai penghindaran pajak/*tax avoidance*) dan secara tidak legal (melalui pengelakan pajak/*tax evasion*) (Santoso dan Rahayu, 2013). Di negara lain, khususnya di Amerika Serikat telah ada pengaturan skema penghindaran pajak yang meliputi penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). *Unacceptable tax avoidance* dapat dikategorikan pula sebagai perencanaan pajak yang agresif (Dyreng *et al.*, 2008; Frank *et al.*, 2009). Di Indonesia belum ada Undang-Undang yang mengatur definisi yang jelas mengenai *acceptable tax avoidance* & *unacceptable tax avoidance*, sehingga pada praktiknya sering terjadi

penafsiran yang berbeda antara wajib pajak dan aparat pajak (Darussalam dan Septriadi, 2009).

Pajak penghasilan badan di Amerika Serikat dikenakan dua kali yaitu di tingkat Federal dan di tingkat negara bagian (pemerintah lokal). Untuk tujuan pajak federal, entitas yang diperlakukan sebagai perusahaan/badan dan didirikan/dijalankan berdasarkan hukum negara bagian (*state*) manapun digolongkan menjadi perusahaan domestik. Untuk tujuan pajak negara bagian (*state*), entitas diselenggarakan di negara bagian tersebut diperlakukan sebagai perusahaan domestik, dan entitas yang diselenggarakan di luar negara bagian tersebut diperlakukan sebagai perusahaan asing (www.irs.gov). Tarif pajak penghasilan badan Amerika Serikat berlaku tarif progresif, yaitu berkisar antara 15% - 35% dikenakan berbeda untuk lapisan penghasilan tertentu dan tarif ini berbeda untuk tiap-tiap negara bagian. Beberapa negara bagian menerapkan tarif pajak bertingkat sesuai lapisan penghasilan, beberapa negara bagian lain menerapkan tarif pajak penghasilan badan tunggal. Pajak penghasilan badan yang telah dibayar pada negara bagian dan pemerintah lokal dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak federal. Oleh karena tarif pajak penghasilan badan yang berbeda antar negara bagian maka kesempatan untuk melakukan perencanaan pajak bagi perusahaan terbuka lebar, misalnya membuka operasi di negara bagian yang tarif pajaknya kecil, menerapkan strategi *transfer pricing*, dll. Di Amerika pembayaran

angsuran pajak yang diperkirakan terhutang untuk satu tahun pajak dilakukan pada bulan ke 4, 6, 9, dan 12 (www.irs.gov).

Berbeda dengan yang ada di Amerika, pajak penghasilan badan di Indonesia hanya dikenai satu kali dan merupakan pajak pusat. Aturan pajak di Indonesia membedakan kewajiban pajak perusahaan domestik dan perusahaan asing sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri. Tidak seperti di Amerika, seluruh wilayah Indonesia berlaku tarif yang sama, tarif pajak penghasilan badan di Indonesia sejak tahun 2009 sudah menggunakan tarif tunggal (UU No.36 tahun 2008). Pajak penghasilan badan di Indonesia terhutang untuk satu tahun pajak dan dapat diangsur setiap masa pajak (tiap satu bulan takwim/kalender). Peraturan pajak di Indonesia sangat kompleks, meskipun demikian masih terdapat celah (*loopholes*) bagi wajib pajak untuk dimanfaatkan sebagai pengurang pajak.

Strategi bisnis yang dianut oleh perusahaan itu ada 3 yaitu strategi bisnis Defender, strategi bisnis Prospector, dan strategi bisnis Analyser yang dapat berguna dalam melakukan penghindaran pajak. Didalam strategi tersebut yang bisa digunakan dalam melakukan penghindaran pajak cuma strategi bisnis Analyser dan strategi bisnis Prospektor. Karena strategi Analyser itu tipe domain produk pasar yang relatif stabil dan tetap melakukan perubahan-perubahan dan perusahaan yang menganut strategi bisnis Prospektor dikarenakan strategi tersebut mudah kehabisan sumber daya nya dalam memproses suatu inovasi produknya. Oleh karena metode

tersebut cenderung melakukan penghindaran pajak, maka penulis ingin mengetahui mengapa banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dibandingkan membayar pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Huseynov dan Klamm,; Dyreng *et al.*, Hanlon dan Slemrod, Frank *et al.*, (dalam Dianwickasih Arieftiara., dkk, 2015), mengenai penghindaran pajak menggunakan pengukuran tunggal atau beberapa pengukuran yang digunakan secara terpisah, yaitu *Tarif Pajak Efektif* (ETR), *Book Tax Difference* (BTD), abnormal BTD, serta abnormal *permanent* difference. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengembangkan ukuran yang lebih komprehensif yaitu menggunakan metrik komposit penghindaran pajak yang terdiri dari 2 ukuran penghindaran pajak yang telah ada, yaitu *Book Efektivitas Tax Rate* (Book ETR), serta *Tarif pajak Efektif Kini* (Current ETR). Penulis menggunakan proxy Book ETR dan *Current ETR* dalam penelitian ini karena sebagai proxy alternative penghindaran pajak untuk memperkuat hasil empiris penelitian ini.

Disamping itu kedua proxy tersebut adalah yang paling banyak digunakan dalam literature. Book ETR menggambarkan selisih antara laba akuntansi dengan pendapatan kena pajak di entitas publik menunjukkan perbuatan penghindaran pajak yang lebih banyak. Secara keseluruhan, entitas yang melakukan tax avoidance dengan meminimal pendapatan kena pajak mereka dengan tetap memelihara profit akuntansi keuangan

mempunyai nilai *Tarif pajak Efektif Kini* yang lebih rendah. Jenis ukuran komposit yaitu skor dari beberapa ukuran tunggal pernah dikembangkan oleh beberapa peneliti lain yaitu komposit ukuran kualitas laba (Bushman *et al.*, 2004); efektivitas dewan komisaris dan komite audit (Hermawan, 2009); dan kualitas audit (Herusetya, 2012). Hasilnya, ukuran komposit tersebut menghasilkan pengukuran yang lebih *valid* dan komprehensif, mampu menjelaskan dengan lebih baik variabel yang diukur serta hasil penelitian yang *robust* setelah melalui berbagai pengujian sensitifitas (Bushman *et al.*, 2004; Herusetya, 2012; Hermawan, 2009). Dari adanya bukti keutamaan menggunakan ukuran komposit tersebut, maka peneliti mengembangkan ukuran komposit penghindaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Higgins, Omer, dan Philips (2010) menyatakan bahwa manfaat potensial penghindaran pajak lebih besar bagi entitas defender dibandingkan dengan perusahaan prospektor. Sebab entitas defender menekankan pada penghematan biaya sebagai acuan keunggulan kompetitif sedangkan prospektor lebih berfokus pada reka baru dan perkembangan. Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian ini, maka pokok perumusan masalah yang akan dibahas yaitu untuk melihat apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan skripsi yaitu Untuk mengetahui pengaruh strategi bisnis dalam melakukan penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan informasi dan memperkaya pemahaman serta digunakan menjadi sebagai acuan dan kajian akademis dimasa mendatang.

2. Bagi Entitas

Riset ini mampu membagikan informasi serta masukan tentang bahaya strategi bisnis serta tax avoidance, maka entitas mampu mengevaluasi serta mendeteksi kemungkinan *future cash* yang kira-kira terjadi.

3. Para Pemodal.

Riset ini mampu memberi gambaran bagi para pemodal agar mendapatkan sistem strategi bisnis mana yang paling cocok dilakukan, dengan demikian bisa untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi.

4. Bagi Pemeintah

Riset ini mampu dijadikan bahan informasi dan bahan kajian bagi pemerintah khususnya Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi program dalam memperbaiki penyusunan undang-undang pajak dimasa mendatang.